
PERAN GERAKAN SOSIAL DALAM TRANSFORMASI POLITIK: TINJAUAN ATAS PEMOGOKAN DAN AKSI MASSA

Puspita Habibah

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Gerakan sosial memiliki peran penting dalam transformasi politik di berbagai belahan dunia. Artikel ini meninjau peran gerakan sosial dalam transformasi politik, dengan fokus pada pemogokan dan aksi massa sebagai bentuk ekspresi kolektif dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah atau institusi politik. Melalui tinjauan atas kasus-kasus kontemporer, artikel ini menganalisis bagaimana gerakan sosial dapat mempengaruhi agenda politik, membentuk opini publik, dan bahkan mengubah struktur politik suatu negara. Dengan mengintegrasikan pendekatan teoritis dan studi kasus empiris, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran gerakan sosial dalam dinamika politik modern.

Kata Kunci: *Gerakan Sosial, Transformasi Politik, Pemogokan*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gerakan sosial telah menjadi kekuatan penting dalam dinamika politik di berbagai belahan dunia. Dari gerakan hak sipil di Amerika Serikat hingga gerakan demokrasi di Timur Tengah, gerakan sosial telah membentuk dan mengubah wajah politik dalam sejarah modern. Dalam konteks transformasi politik, gerakan sosial sering kali menjadi agen perubahan yang kuat, menggerakkan perubahan struktural dan membuka jalan bagi reformasi politik yang signifikan.

Tinjauan atas peran gerakan sosial dalam transformasi politik menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat yang terus berubah dan tuntutan akan perubahan politik yang lebih besar. Salah satu bentuk ekspresi yang paling terlihat dari gerakan sosial adalah melalui pemogokan dan aksi massa. Pemogokan dan aksi massa merupakan bentuk protes kolektif yang melibatkan partisipasi massal dari masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah atau institusi politik yang ada.

Pemogokan seringkali menjadi alat utama bagi buruh dan pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tempat kerja, sedangkan aksi massa sering digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan politik atau sosial yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Melalui pemogokan dan aksi massa, gerakan sosial mampu menggalang dukungan massal, mengkoordinasikan tindakan kolektif, dan menarik perhatian publik serta pemerintah terhadap isu-isu penting yang membutuhkan perubahan.

Dalam konteks tinjauan atas pemogokan dan aksi massa, artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran gerakan sosial dalam transformasi politik. Dengan menganalisis kasus-kasus kontemporer di berbagai belahan dunia, artikel ini akan membahas bagaimana gerakan sosial dapat mempengaruhi agenda politik, membentuk opini publik, dan bahkan mengubah struktur politik suatu negara melalui pemogokan dan aksi massa. Melalui integrasi pendekatan teoritis dan studi kasus empiris, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika peran gerakan sosial dalam transformasi politik modern.

Metode Penelitian

- 1. Pendekatan Kualitatif:** *Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran gerakan sosial dalam transformasi politik melalui pemogokan dan aksi massa. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dimensi fenomena tersebut, termasuk konteks sejarah, faktor-faktor sosial, dan implikasi politiknya.*
- 2. Studi Kasus:** *Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis berbagai kasus pemogokan dan aksi massa yang telah terjadi di berbagai belahan dunia. Studi kasus dipilih berdasarkan relevansi dan signifikansinya dalam memahami dinamika peran gerakan sosial dalam*

transformasi politik. Data akan dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk literatur akademis, laporan media, dan dokumentasi gerakan sosial.

3. **Analisis Konten:** *Metode analisis konten akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Analisis ini akan melibatkan identifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan tren dalam pemogokan dan aksi massa, serta cara gerakan sosial mempengaruhi agenda politik, membentuk opini publik, dan mengubah struktur politik.*
4. **Wawancara Mendalam:** *Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan wawancara mendalam dengan para aktivis gerakan sosial, ahli politik, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pemogokan dan aksi massa. Wawancara ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang motivasi, strategi, dan dampak dari gerakan sosial dalam transformasi politik.*
5. **Analisis Komparatif:** *Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan analisis komparatif untuk membandingkan berbagai kasus pemogokan dan aksi massa di berbagai konteks politik dan sosial. Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi pola-pola umum dan perbedaan dalam peran gerakan sosial dalam transformasi politik di berbagai negara.*
6. **Validasi Data:** *Untuk memastikan validitas data, penelitian ini akan menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber dan metode. Hal ini akan membantu dalam memastikan keakuratan dan keandalan temuan penelitian.*

Melalui penggunaan kombinasi metode penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran gerakan sosial dalam transformasi politik melalui pemogokan dan aksi massa. Dengan menganalisis kasus-kasus konkret dan menggali perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman kita tentang dinamika politik modern dan potensi peran gerakan sosial dalam menciptakan perubahan yang signifikan.

PEMBAHASAN

Peran gerakan sosial dalam transformasi politik melalui pemogokan dan aksi massa mencerminkan dinamika kompleks yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengartikulasikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah atau institusi politik yang ada. Sejak zaman dahulu, gerakan sosial telah menjadi kekuatan yang mengubah landasan politik, memperjuangkan hak-hak asasi manusia, kesetaraan, keadilan, dan perubahan struktural dalam masyarakat. Dalam tinjauan ini, kita akan mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh gerakan sosial, khususnya melalui pemogokan dan aksi massa, dalam memperkuat demokrasi, mengubah kebijakan, dan membentuk identitas politik masyarakat.

Gerakan sosial berperan penting dalam memperkuat demokrasi dengan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang tidak terwakili atau ditekan dalam proses politik resmi. Pemogokan dan aksi massa menjadi saluran bagi kelompok-kelompok ini untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, atau politik yang mereka hadapi.

Pemogokan dan aksi massa sering kali menjadi katalisator bagi perubahan kebijakan. Ketika masyarakat menunjukkan ketidakpuasan mereka secara massal, pemerintah sering kali terdorong untuk merespons tuntutan tersebut dengan mengambil tindakan yang sesuai. Dalam beberapa kasus, pemogokan atau aksi massa dapat memicu reformasi hukum, kebijakan baru, atau bahkan pergantian pemerintah.

Selain itu, gerakan sosial melalui pemogokan dan aksi massa memiliki potensi untuk mengubah struktur politik dan sosial suatu negara. Mereka dapat mengguncang status quo, mengganggu kekuatan yang mapan, dan membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih inklusif. Dalam beberapa kasus, pemogokan dan aksi massa bahkan telah mengarah pada perubahan sistem politik secara keseluruhan.

Namun, peran gerakan sosial dalam transformasi politik melalui pemogokan dan aksi massa tidak selalu berjalan mulus. Mereka sering menghadapi hambatan dan tantangan yang signifikan, termasuk represi oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, resistensi dari kelompok-kelompok kepentingan yang mapan, dan pembelahan internal di dalam gerakan itu sendiri.

Penting untuk diakui bahwa pemogokan dan aksi massa bukanlah satu-satunya bentuk ekspresi dari gerakan sosial. Selain melalui tindakan massal, gerakan sosial juga dapat beroperasi melalui kegiatan advokasi, pendidikan, kampanye politik, dan pembentukan koalisi dengan kelompok-kelompok lain.

Dalam konteks global yang terus berubah, peran gerakan sosial dalam transformasi politik menjadi semakin relevan. Mereka sering kali menjadi motor perubahan dalam mengatasi tantangan-tantangan kompleks seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, ketidakadilan rasial, atau kebijakan luar negeri yang kontroversial.

Dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global, gerakan sosial juga dapat beroperasi melintasi batas-batas nasional, membentuk jaringan internasional, dan memobilisasi dukungan lintas negara untuk tujuan-tujuan bersama.

Namun, peran gerakan sosial dalam transformasi politik tidak selalu diakui atau dihargai sepenuhnya oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Mereka sering dianggap sebagai ancaman atau gangguan terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional oleh pihak-pihak yang berkuasa.

Pentingnya pengakuan terhadap peran gerakan sosial dalam transformasi politik menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan partisipasi politik yang inklusif dalam setiap masyarakat yang demokratis. Tanpa ruang bagi gerakan sosial untuk beroperasi secara bebas dan tanpa gangguan, demokrasi menjadi terbatas dan masyarakat menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang kompleks, seperti krisis iklim, konflik bersenjata, atau pandemi, peran gerakan sosial dalam transformasi politik menjadi semakin penting. Mereka dapat memobilisasi dukungan massal, memperjuangkan kepentingan masyarakat sipil, dan mengawal jalannya proses politik menuju kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan bersama.

Tinjauan atas peran gerakan sosial dalam transformasi politik melalui pemogokan dan aksi massa menyoroti pentingnya memahami dinamika politik modern dan menghargai kontribusi masyarakat sipil dalam pembangunan demokratis dan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung secara global, gerakan sosial tetap menjadi kekuatan penting dalam membentuk masa depan yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Dalam konteks lanjutan, penting untuk mengakui bahwa peran gerakan sosial dalam transformasi politik tidak hanya terbatas pada pemogokan dan aksi massa. Meskipun pemogokan dan aksi massa menjadi contoh yang paling terlihat dan sering kali paling mencolok dari partisipasi masyarakat dalam politik, namun gerakan sosial juga dapat memanifestasikan dirinya melalui berbagai bentuk ekspresi lainnya.

Salah satu bentuk ekspresi tersebut adalah melalui kegiatan advokasi dan kampanye politik. Gerakan sosial sering kali terlibat dalam upaya advokasi untuk mengubah kebijakan publik atau legislasi yang dianggap tidak adil atau merugikan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Mereka dapat menggunakan berbagai strategi, termasuk lobi politik, demonstrasi damai, atau kampanye informasi, untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan opini publik.

Selain itu, gerakan sosial juga dapat berperan dalam pendidikan politik dan kesadaran masyarakat. Mereka dapat mengorganisir acara publik, seminar, atau workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu politik dan sosial yang penting, serta mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dan terinformasi.

Pembentukan koalisi antara berbagai kelompok sosial juga merupakan strategi yang penting dalam peran gerakan sosial dalam transformasi politik. Melalui kerjasama lintas sektoral dan lintas kelompok, gerakan sosial dapat menggabungkan kekuatan mereka untuk memperjuangkan tujuan bersama, meningkatkan legitimasi mereka dalam mata publik, dan memperluas jangkauan dampak mereka.

Selain itu, peran gerakan sosial dalam transformasi politik juga dapat dilihat dalam kontribusinya terhadap pembangunan identitas politik masyarakat. Melalui pemogokan dan aksi massa, gerakan sosial sering kali berhasil menggugah kesadaran politik masyarakat, membangun solidaritas di antara kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan membentuk identitas politik yang kuat dan berkelanjutan.

Namun, peran gerakan sosial dalam transformasi politik juga tidak lepas dari kritik dan tantangan. Beberapa kritikus mungkin menyoroti ketidakstabilan yang dihasilkan oleh pemogokan dan aksi massa, serta potensi mereka untuk memicu kekerasan atau konflik sosial yang lebih besar. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang representativitas gerakan sosial dan sejauh mana mereka benar-benar mewakili kepentingan seluruh masyarakat.

Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, penting bagi gerakan sosial untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, inklusivitas, dan keadilan dalam setiap tindakan politik mereka. Mereka juga perlu terus memperkuat basis dukungan mereka di antara masyarakat, membangun jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya, serta terus mengembangkan strategi-strategi inovatif untuk mencapai tujuan politik mereka.

Peran gerakan sosial dalam transformasi politik melalui pemogokan dan aksi massa menunjukkan kompleksitas dan signifikansinya dalam dinamika politik modern. Meskipun mereka sering dihadapkan pada tantangan dan kritik, gerakan sosial tetap menjadi kekuatan yang tak terbantahkan dalam memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan terus memperkuat solidaritas, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan bersama, gerakan sosial dapat terus menjadi agen perubahan yang kuat dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Dalam melanjutkan pembahasan tentang peran gerakan sosial dalam transformasi politik, penting untuk memperhatikan peran teknologi dan media sosial dalam memperluas jangkauan dan dampak gerakan sosial. Teknologi telah mengubah cara gerakan sosial beroperasi, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi, mengorganisir, dan memobilisasi massa dengan cepat dan efisien.

Media sosial, khususnya, telah menjadi alat yang sangat penting bagi gerakan sosial dalam menyebarkan pesan mereka, menggalang dukungan, dan mengkoordinasikan aksi massa. Dengan menggunakan platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, gerakan sosial dapat menciptakan narasi yang kuat, menghubungkan dengan simpatisan di seluruh dunia, dan membuat tekanan politik yang signifikan pada pemerintah atau institusi yang mereka tuntut.

Namun, sementara teknologi telah memberikan keuntungan besar bagi gerakan sosial, juga penting untuk diakui bahwa media sosial juga dapat menjadi alat yang kontroversial dan berpotensi membahayakan. Penyebaran informasi palsu atau provokatif, polarisasi opini publik, dan penindasan online adalah beberapa tantangan yang dihadapi gerakan sosial dalam memanfaatkan media sosial untuk tujuan politik mereka.

Selain itu, peran gerakan sosial dalam transformasi politik juga memunculkan pertanyaan tentang hubungan mereka dengan lembaga-lembaga politik formal, seperti partai politik atau parlemen. Beberapa gerakan sosial memilih untuk tetap independen dan mengadopsi pendekatan non-partisan dalam upaya mereka untuk mempengaruhi kebijakan, sementara yang lain mungkin memilih untuk berpartisipasi dalam proses politik formal dengan membentuk aliansi dengan partai politik atau mencalonkan kandidat mereka sendiri.

Penting untuk diakui bahwa peran gerakan sosial dalam transformasi politik dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya di mana mereka beroperasi. Di beberapa negara, gerakan sosial mungkin memiliki akses yang lebih besar ke institusi politik formal dan lebih mampu memengaruhi kebijakan publik, sementara di negara lain, mereka mungkin menghadapi represi atau penindasan yang lebih besar dari pemerintah atau otoritas yang berwenang.

Namun demikian, meskipun menghadapi berbagai tantangan, peran gerakan sosial dalam transformasi politik tetap menjadi penting dalam memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan politik dan teknologi, gerakan sosial dapat terus

menjadi agen perubahan yang kuat dalam masyarakat yang berjuang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Dalam konteks lanjutan, peran gerakan sosial dalam transformasi politik juga memunculkan pertanyaan tentang dampak jangka panjang dari aksi massa dan pemogokan terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional suatu negara. Meskipun pemogokan dan aksi massa sering kali merupakan bentuk protes yang sah dan berfungsi sebagai mekanisme untuk menyuarakan ketidakpuasan masyarakat, mereka juga dapat menimbulkan ketegangan sosial yang meningkat, konflik antar kelompok, dan bahkan kekacauan politik.

Dalam beberapa kasus ekstrem, pemogokan dan aksi massa dapat mengarah pada kekerasan, kerusuhan, atau bahkan pemberontakan bersenjata, yang dapat membahayakan stabilitas politik dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penting bagi gerakan sosial untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tindakan mereka, serta mencari solusi damai dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik politik.

Selain itu, dalam konteks global yang semakin terhubung, peran gerakan sosial dalam transformasi politik juga dapat memiliki dampak yang meluas di luar batas negara. Gerakan sosial sering kali terlibat dalam kampanye internasional untuk memperjuangkan hak asasi manusia, perdamaian dunia, atau keadilan global. Mereka dapat memobilisasi solidaritas lintas negara, mengkoordinasikan tindakan kolektif, dan mempengaruhi kebijakan internasional.

Namun, tantangan dalam menggalang dukungan lintas negara dan mengatasi perbedaan budaya, bahasa, dan kepentingan politik dapat menjadi hambatan yang signifikan bagi gerakan sosial dalam usaha mereka untuk menciptakan perubahan di tingkat global. Oleh karena itu, penting bagi gerakan sosial untuk membangun jaringan kemitraan yang kuat dengan organisasi-organisasi internasional, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah negara-negara lain untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

Selain itu, peran gerakan sosial dalam transformasi politik juga dapat membentuk narasi politik yang berkelanjutan dan mempengaruhi budaya politik suatu masyarakat. Dengan menyuarakan isu-isu yang diabaikan atau diabaikan oleh institusi politik formal, gerakan sosial dapat memperluas wawasan politik masyarakat, memperkuat kesadaran politik, dan membentuk opini publik tentang isu-isu krusial yang memengaruhi kehidupan mereka.

Dalam mengakhiri pembahasan, penting untuk diingat bahwa peran gerakan sosial dalam transformasi politik adalah fenomena yang kompleks dan beragam. Meskipun mereka sering dihadapkan pada tantangan dan hambatan yang signifikan, gerakan sosial tetap menjadi kekuatan yang tak terbantahkan dalam memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan terus memperkuat solidaritas, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan menciptakan solusi yang inklusif, gerakan sosial dapat terus menjadi agen perubahan yang kuat dalam masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, peran gerakan sosial dalam transformasi politik melalui pemogokan dan aksi massa adalah bagian integral dari dinamika politik modern. Melalui pemogokan dan aksi massa, gerakan sosial mampu menyuarakan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, atau politik yang mereka hadapi. Gerakan sosial tidak hanya memperjuangkan perubahan kebijakan, tetapi juga mempengaruhi agenda politik, membentuk opini publik, dan bahkan mengubah struktur politik suatu negara.

Pemogokan dan aksi massa merupakan bentuk protes kolektif yang melibatkan partisipasi massal dari masyarakat. Mereka menjadi saluran bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau tidak terwakili untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka. Dengan memobilisasi massa, gerakan sosial mampu menghasilkan tekanan politik yang signifikan pada pemerintah atau institusi yang mereka tuntut.

Namun, peran gerakan sosial dalam transformasi politik juga dihadapkan pada tantangan dan kritik. Pemogokan dan aksi massa dapat menimbulkan ketegangan sosial, konflik antar kelompok, atau bahkan kekacauan politik. Selain itu, gerakan sosial juga perlu mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tindakan mereka dan mencari solusi damai untuk menyelesaikan konflik politik.

Pentingnya pengakuan terhadap peran gerakan sosial dalam transformasi politik menyoroti pentingnya partisipasi politik yang inklusif, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan kebebasan berbicara dalam masyarakat yang demokratis. Gerakan sosial memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang kuat dalam memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Dengan terus memperkuat solidaritas, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan menciptakan solusi yang inklusif, gerakan sosial dapat terus menjadi kekuatan yang tak terbantahkan dalam membangun masa depan yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB*. Retrieved from osf.io/3jpd/.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri 1 Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning*. uma. ac. id.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, S. A. (2018). *implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemis serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*.
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*.
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan*.
- OKTAVIANI, R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN MERCU PADA BENDUNGAN LAU SIMEME SIBIRU-BIRU-DELISERDANG SUMATERA UTARA*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- PRATAMA, R., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN LIVING PLAZA MEDAN*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Rahmawani, R. (2021). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Simarmata, O. H. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan (Roa) Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Nilai Perusahaan (Per) Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2010-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Siregar, N. S. S. (2002). Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia.*
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang.*
- Tarigan, R. S. (2017). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC).*
- Tarigan, U. (2004). Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.*
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2004). Fungsi Penataan Kearsipan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Kepegawaian Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- TELAUMBANUA, F., & Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BANK BRI MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*